PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA (PKD) DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA TELUK DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Sastra Satu (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri

Disusun Oleh:

SUPRIYADI
NIM : 301211010037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Supriyadi
NIM	: 301211010037
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan t idak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, Juni 2026
Yang Menyatakan,



Supriyadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

Alamat: Jalan Subrantas Nomor 17 Tembilaha-Indragiri Hilir-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Supriyadi
NIM	: 301211010037
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Juni 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Jamri, S.H., M.H.	**Herdiansyah , Lc.,MA**
NIDN : 1009098001	**NIDN : 1014108903**

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, SE.,SH.,M.H
NIDN : 1014026702

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap

Nama	: Supriyadi
NIM	: 301211010037
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
Pembimbing I	: Jamri, S.H., M.H.
Pembimbing II	: Herdiansyah , Lc.,MA

NO	TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		I	II		
1	03/05/2026		✓	Perbaiki penulisan BAB II	
2	11/05/2026		✓	Perbaiki Penulisan BAB III	
3	03/06/2026		✓	perbaiki penulisan BAB III Daftar pustaka	
4	10/06/2026		✓	ACC lanjut Pendahuluan I	
5	11/6/2026	✓		Singkronkan pa MLY	
6	23/6/2026	✓		Perbaiki daftar pustaka	
7	25/6/2026	✓		Sinkronkan penulisan dan daftar pustaka	
8	1/6/2026	✓		ACC	
9					

Tembilahan, Juni 2026
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Dr. Ali Azhar, S. Sos.,M.H
NIDN : 1014026702

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
   Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
   Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM
Kampus Soebarantas Jalan H.R. Soebarantas Nomor : 02, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
0853 6330 0314 (0768) 2386 Laman website: http://www.unisi.ac.id

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor 68/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama	:	Supriyadi
NIM	:	301211010037
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir
Waktu	:	14:00-15:00
Tempat	:	Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil	:	B
Keterangan	:	Aman dan Tertib

Tembilahan, Agustus 2026

Tim Penguji

1. Jamri,S.H,.M.H
2. Herdiansyah,Lc,.MA
3. Syarifuddin,S.H,.M.H
4. Dr.Siti Rahma,S.H,.M.H
5. Dr.Bambang Sasmita Adi Putra,S.H.M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Dr. Ali Azhar, S. Sos.,M.H
NIDN : 1014026702

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr.Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

Ilmu Karya Abdi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

KATA PENGANTAR

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT sang Maha pencipta alam semesta dan isinya, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang diharapkan. Shalawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW khalifah umat manusia yang mewariskan ilmu pengetahuan untuk semua umat manusia sebagai penyempurna dari ilmu-ilmu sebelumnya dalam meraih ridho Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini sangat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas Rahmat Allah SWT dan bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Rampungnya skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Islam Indragiri, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta perlindungan kepada penulis.
2. Kedua orang tua tercinta ayahanda ibunda yang telah memberikan kasih sayang tiada terhingga kepada penulis.
3. Saudara dan saudari tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis
4. Bapak Dr. Ali Azhar, S. Sos.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

5. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri.
6. Bapak Jamri, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan waktu dan ilmunya.
7. Bapak Herdiansyah, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan ilmunya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang banyak membantu dan memberikan arahan.
9. Alumni Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan masukan dan motivasi serta berbagi ilmu.
10. Rekan rekan mahasiswa Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
11. Semua pihak yang telah membantu penulis selama pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini.

Besar harapan penulis semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya, oleh karena itu penulis terbuka menerima kritik dan saran serta berdiskusi dengan pembaca.

Tembilahan, 28 Mei 2026

Supriyadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA (PKD) DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA TELUK DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh : Supriyadi
Pembimbing I : Jamri, S.H., M.H. Pembimbing II : Herdiansyah, Lc., MA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis efektivitas peran PKD dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKD telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang, sedangkan pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan pemilu. Dalam penanganan pelanggaran, PKD menerima laporan, melakukan penelusuran informasi, mengumpulkan data, dan meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pembuktian praktik politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, keterbatasan sumber daya pengawas, luas wilayah pengawasan, serta masih kuatnya budaya politik transaksional. Meskipun demikian, peran PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dapat dikategorikan cukup efektif karena mampu meningkatkan pengawasan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dan mendorong terciptanya pemilu yang lebih berintegritas. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan penguatan kapasitas pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang.

Kata Kunci: *Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Politik Uang, Pemilu Legislatif 2024, Pengawasan Pemilu, Demokrasi.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

ABSTRACT

This study aims to examine the role of Village/Subdistrict Election Supervisors (Pengawas Kelurahan/Desa or PKD) in addressing money politics practices during the 2024 Legislative Election in Teluk Dalam Village, Indragiri Hilir Regency, identify the obstacles encountered in carrying out their duties, and analyze the effectiveness of PKD's role in promoting fair and honest elections. This research employed an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed qualitatively.

The findings indicate that PKD has carried out its role in accordance with applicable laws and regulations through preventive measures, supervision, handling of violations, and coordination with relevant stakeholders. Preventive efforts were conducted through socialization and public education regarding the dangers of money politics, while supervision was implemented throughout all stages of the election process. In handling violations, PKD received reports, conducted preliminary investigations, collected relevant information and evidence, and forwarded findings to the competent authorities for further action. However, the implementation of these duties faced several challenges, including low public legal awareness, difficulties in proving money politics violations, limited public participation in reporting violations, inadequate supervisory resources, broad supervisory areas, and the persistence of a transactional political culture. Despite these challenges, the role of PKD in preventing and taking action against money politics can be categorized as moderately effective, as it has contributed to strengthening election oversight, enhancing political education among the public, and promoting electoral integrity. To further improve its effectiveness, it is necessary to strengthen the capacity of election supervisors, increase public participation, provide continuous political education, and enforce stricter legal sanctions against perpetrators of money politics.

Keywords: *Village/Subdistrict Election Supervisors (PKD), Money Politics, 2024 Legislative Election, Election Supervision, Democracy.*